

KONSEP POLITIK DALAM ALQUR'AN

Ali Akbar

Abstrak

Kitab suci Al-Qur'an memuat seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Oleh karena itu, kegiatan politik yang seharusnya adalah sejalan dengan syari'ah Allah SWT seperti yang telah ditetapkan dalam kitab pedoman hidup seluruh umat manusia itu. Namun pada kenyataannya keberlangsungan mekanisme politik saat ini telah menjauh dari nilai-nilai yang sudah tertulis dalam al-Qur'an dan yang telah pernah terapkan dalam suatu komunitas digjaya peradaban akhlak Islam masa lalu yaitu komunitas Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Untuk itu, pada saat ini diperlukan kajian reflektif dan tafsiran kontekstual kontemporer terhadap ayat-ayat yang mengatur perpolitikan dalam Islam.

Kata Kunci: Politik, Al-Qur'an

Pendahuluan

Berbagai persoalan politik Islam pada masyarakat dewasa ini, memberi gambaran bahwa diperlukan suatu pemahaman yang benar, evaluatif, kritis, dan rasional dalam pengkajian ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan politik. Mengingat bahwa bidang kehidupan politik adalah berkaitan langsung dengan kepentingan banyak orang termasuk di dalamnya baik masyarakat borjuis maupun kepentingan rakyat kecil (kelas bawah di masyarakat) yang sepanjang sejarah di dunia terdapat kesenjangan diantara keduanya. Selain itu, di atas pembentukan pemerintahan dan kenegaraan adalah atas dasar penegakan prinsip-prinsip ilahiyah dan manfaat-manfaat amaliah, bukan atas dasar sesuatu yang lain.

Politik pemerintahan yang berlaku pada masa Rasulullah dan para khalifah adalah menegakkan aturan-aturan Allah SWT. Wahyu Allah mengarahkan Rasul dan kaum muslimin untuk menjamin kemaslahatan umum, memikirkan usaha-usaha menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Salah satu ayat diantaranya adalah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿١٠٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿١٠٤﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi 3. Dan

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi 4. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan¹.

Demikianlah, alquran sendiri mengatur urusan politik secara khusus, seperti pernyataan ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan, kebajikan, membantu kaum lemah, dan melarang perbuatan yang tidak senonoh, tercela, serta durhaka. Alquran meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan. Rasulullah sendiri menentukan sistem politik dan kekuasaan tertentu melalui sunah dan kebijaksanaannya.

Oleh karena itu, politik harus menjadi gerakan Islam yang mempunyai keterkaitan dengan sebuah institusi yang bernama kekuasaan. Islam juga mengutamakan fungsi pertolongan pada kaum miskin dan menderita serta menyerahkan tentang bentuk negara pada kebijaksanaan umat sepanjang bentuk negara yang diinginkan itu tetap dalam koridor penegakan prinsip-prinsip ketuhanan yang menuntut pada fungsi pertolongan pada kaum miskin dan menderita tersebut. Hal-hal seperti itulah menjadi tekanan bagi gerakan-gerakan Islam dalam membangun sebuah bangsa, gerakan Islam yang demikian akan mengarahkan pada formalisasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, formalisasi ideologi Islam diperlukan dalam kehidupan bernegara untuk memudahkan urusan-urusan pelaksanaan ajaran agama dalam negara secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kepentingan yang mendesak adalah aktualisasi ideologi Islam itu. Dengan demikian, agama Islam menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam kehidupan bernegara. Inti pandangan seperti itu terletak pada kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan.

Merujuk uraian di atas, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun pandangan yang bersahabat antara Islam dan kehidupan politik merujuk pada Rasulullah SAW dan para khulafa' ar-rasyidin. Hal itu, akan dapat tumbuh dan berkembang jika mendapat dukungan sikap, nilai, kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku berkaitan dengan perkembangan peradaban yang kondusif. Hal itu juga disebabkan oleh kenyataan yang tak terbantahkan bahwa umat Islam

tidak bisa menghindar dari kenyataan baru yang sama sekali berbeda. Ini menunjukkan bahwa dalam memandang sesuatu persoalan, umat Islam lebih mementingkan pendekatan profesional, bukan politis. Kalau saja dimengerti dengan baik, hal itu akan menjadi jelas mengapa Islam lebih mementingkan masyarakat adil dan makmur atau dengan kata lain masyarakat sejahtera, yang lebih diutamakan kitab suci tersebut, daripada masalah bentuk negara. Jika hal ini disadari sepenuhnya oleh kaum muslimin, tentu salah satu sumber keruwetan dalam hubungan antarsesama umat, khususnya umat Islam, dapat dihindari. Artinya, ketidakmampuan dalam memahami hal itulah yang menjadi sebab kemelut luar biasa dalam lingkungan gerakan Islam dewasa ini.

Politik Dalam Islam

Politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama salafush shalih dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya seperti yang digunakan Abdur Rahman Taj dalam karyanya *Al-Siyasat al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*, kata tersebut diterjemahkan dengan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash tafshili yang juz'i dalam al-Qur'an dan sunnah².

Dalam *Lisan al-'Arab*, *siyasah* berakar kata *sâsa – yasûsu* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara terminologis *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan³. Abdul Wahab Khallaf mengutip pendapat al-Maqrizi mengatakan arti kata *siyasah* adalah mengatur dan beliau mendefenisikannya secara terminologis sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan⁴.

Jadi, asalnya makna *siyasah* (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus (*siyasiyun*). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurus (*yasûsu*) rakyatnya saat mengurus urusan rakyat, mengaturnya, dan

menjaganya. Begitu pula dalam perkataan orang Arab dikatakan : ‘Bagaimana mungkin rakyatnya terpelihara (*masûsah*) bila pemeliharanya adalah ngengat (*sûsah*)’, artinya bagaimana mungkin kondisi rakyat akan baik bila pemimpinnya rusak seperti ngengat yang menghancurkan kayu. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (*ri’ayah*), perbaikan (*ishlah*), pelurusan (*taqwim*), pemberian arah petunjuk (*irsyad*), dan pendidikan (*ta`dib*)⁵.

Dengan demikian, politik atau *siyasah* itu makna awalnya adalah mengurus urusan masyarakat. Berkecimpung dalam politik berarti memperhatikan kondisi kaum muslimin dengan cara menghilangkan kezhaliman penguasa pada kaum muslimin dan melenyapkan kejahatan musuh kafir dari mereka. Untuk itu perlu mengetahui apa yang dilakukan penguasa dalam rangka mengurus urusan kaum muslimin, mengingkari keburukannya, menasihati pemimpin yang mendurhakai rakyatnya, serta memeranginya pada saat terjadi kekufuran yang nyata. Berarti secara ringkas Politik Islam memberikan pengurusan atas urusan seluruh umat Muslim.

Namun, realitas politik demikian menjadi pudar saat terjadi kebiasaan umum masyarakat dewasa ini baik perkataan maupun perbuatannya menyimpang dari kebenaran Islam yang dilakukan oleh mereka yang beraqidahkan sekularisme, baik dari kalangan non-muslim atau dari kalangan umat Islam. Jadilah politik disifati dengan kedustaan, tipu daya, dan penyesatan yang dilakukan oleh para politisi maupun penguasa. Penyelewengan para politisi dari kebenaran Islam, kezhaliman mereka kepada masyarakat, sikap dan tindakan sembrono mereka dalam mengurus masyarakat memalingkan makna lurus politik tadi. Bahkan, dengan pandangan seperti itu jadilah penguasa memusuhi rakyatnya bukan sebagai pemerintahan yang shalih dan berbuat baik. Hal ini memicu propaganda kaum sekularis bahwa politik itu harus dijauhkan dari agama (Islam). Sebab, orang yang paham akan agama itu takut kepada Allah SWT sehingga tidak cocok berkecimpung dalam politik yang merupakan dusta, kezhaliman, pengkhianatan, dan tipu daya. Cara pandang demikian, sayangnya, sadar atau tidak mempengaruhi sebagian kaum muslimin yang juga sebenarnya ikhlas dalam memperjuangkan Islam. Padahal propaganda tadi merupakan kebenaran yang digunakan untuk kebathilan. Jadi, secara ringkas Islam tidak bisa dipisahkan dari politik.

Islam boleh jadi merupakan agama yang paling kaya dengan pemikiran politik. Antony Black menjabarkan bahwa pemikiran politik Islam terentang mulai masalah etika politik, filsafat politik, agama, hukum, hingga tata negara. Black juga mengungkapkan bahwa pemikiran politik Islam dipengaruhi oleh pemikiran politik Plato, Aristoteles, dan Iran kuno⁶. Tapi keragaman khazanah pemikiran politik Islam itu bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Bolehlah kita sebut pemikiran para pemikir muslim yang menginginkan pemisahan Islam dan politik sebagai pemikiran politik Islam dan pemikiran yang menghendaki penyatuan Islam dan politik sebagai pemikiran Islam politik. Ketika sejak Revolusi Prancis agama Kristen relatif telah selesai membahas hubungan gereja dan negara—bahwa gereja harus terpisah dari Negara Islam masih berkuat pada persoalan yang satu ini, sejak zaman Nabi hingga zaman kini.

Pada zamannya, Nabi membentuk sebuah komunitas, yang diyakini bukan cuma komunitas agama, tapi juga komunitas politik. Nabi berhasil menyatukan berbagai komunitas kesukuan dalam Islam. Di Madinah, tempat hijrah Nabi, beliau berhasil menyatukan komunitas sosial, yakni kaum pemukim dan kaum pendatang. Lebih dari itu, di Madinah, Nabi juga berhasil mengatur kehidupan kaum muslim, Nasrani, serta Yahudi dalam komunitas “Negara Madinah” atau “masyarakat Madinah”.

Komunitas yang dibentuk Nabi di Madinah inilah yang belakangan acap dirujuk oleh para pemikir muslim, baik yang liberal maupun yang fundamentalis, sebagai masyarakat Islam ideal. Pemikir liberal lebih suka menyebut komunitas yang dibentuk Nabi di Madinah sebagai “masyarakat madani”, sedangkan mereka yang fundamentalis lebih nyaman menyebut “Negara Madinah”.

Pada masa Rasulullah SAW, Negara Madinah terdiri dari sejumlah propinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Makkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Seorang qadhi diberi beberapa kekuasaan penuh dalam memutuskan setiap perkara karena secara structural ia tidak berada di bawah wali. Ali Bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang qadhi yang diangkat Nabi yang bertugas di dua propinsi berbeda⁷.

Pemimpin dalam masa awal Islam disebut khalifah, dalam kamus dan ensiklopedi berbahasa Inggris khalifah berarti wakil (*deputy*), pengganti (*successor*), penguasa (*vicegerent*), title bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW⁸. Di masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah (661-850 Masehi), pemikiran politik Islam didominasi oleh perdebatan tentang sistem pemerintah atau lebih tepatnya hubungan khalifah dan negara. Kedua dinasti Islam ini cenderung menganut sistem pemerintah atau sistem politik yang tidak memisahkan agama dan negara. Bahkan agama yang direpresentasikan oleh khalifah cenderung mensubordinasi negara atau kehidupan politik di kedua dinasti. Tapi, sejak kira-kira 850 M, pemikiran dan praktek politik yang dominan di dunia muslim adalah yang memisahkan agama dan negara. Kekuasaan dibagi antara sultan yang mengatur urusan militer serta menegakkan hukum dan ketertiban dan ulama yang mengatur urusan sosial dan keluarga.

Sejak 1000-1200 M, para pemikir muslim, seperti Al- Mawardi , Nizam al-Mulk, Al- Gazali , Ibn Rusyd , serta Al-Razi, menawarkan pemikiran politik jalan tengah atau pemikiran politik keseimbangan. Di masa-masa tersebut, sultan dan ulama saling bekerja sama dan saling tergantung. Namun, pada 1220-1500 M, ide penyatuan agama dan politik kembali mendominasi pemikiran para pemikir muslim. Pemikir muslim yang paling menonjol pada masa itu, yang menganjurkan pemerintahan berdasarkan syariat, adalah Ibn Taimiyah. Black sendiri dalam buku ini menyebut masa itu sebagai masa “syariat dan pedang”.

Puncak pemerintahan berdasarkan syariat berlangsung pada masa kerajaan-kerajaan modern yang meliputi Dinasti Utsmani, Dinasti Safawi, dan Dinasti Mogul. Tentu saja Dinasti Utsmani, yang berpusat di Turki, menjadi dinasti paling terkemuka. Dinasti ini disebut Khilafah Islamiyah. Namun, dinasti ini mengalami kemunduran dan dibubarkan pada 1924.

Kemunduran ini menandai mulai berpengaruhnya pemikiran politik Barat. Para pemikir yang diidentifikasi sebagai pemikir liberal bermunculan. Mereka antara lain Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang menganut paham pemisahan agama dan politik. Berpijak pada kemajuan Barat, para pemikir muslim ini menawarkan pemikiran modernisme. Black menyebut masa ini sebagai abad modernisme.

Tapi kemajuan Barat dewasa ini memunculkan reaksi di kalangan pemikir Islam fundamentalis. Pemikir Islam fundamentalis paling terkemuka adalah tokoh Ikhwanul Muslim, Al- Maududi , serta Sayyid Qutb . Mereka menginginkan kehidupan masyarakat muslim dewasa ini mencontoh kehidupan di masa Nabi atau setidaknya masa kejayaan dinasti-dinasti di masa awal Islam⁹. Itu berarti mereka menginginkan tidak adanya pemisahan agama dan politik.

Jika kita perhatikan materi pemikiran Islam sejak masa Nabi hingga masa kini nyaris tiada yang baru di situ. Tapi, bagaimanapun, pemetaan pemikiran Islam secara kronologis, sebagaimana yang dilakukan oleh Black, sangat membantu kita dalam memahami alur serta dinamika khazanah pemikiran politik dunia Islam. Melalui buku ini pula, kita tahu bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah pertarungan antara pemikiran politik Islam dan pemikiran Islam politik.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

*"Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras & berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka & mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka untuk urusan itu, kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah."*¹⁰

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾

*"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka"*¹¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٨﴾

"wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan."¹²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ءَلَّا مَنَنْتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٩﴾

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."¹³

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

"maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai Hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."¹⁴

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ۗ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik.

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat Petunjuk."¹⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*"wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."*¹⁶

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٤﴾

*"Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."*¹⁷

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah bukti dan alasan bahwa bukan suatu pelanggaran jika kita berpolitik praktis, malah jika kita hubungkan kepada prinsip-prinsip dasar berpolitik, semuanya menjadi saling menguatkan dengan ayat-ayat al-Qur'an tadi, dan jadilah politik sesuatu yang wajib bagi kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa diantara kamu melihat sebuah kemungkaran maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya (kekuasaan yang besar dan bersifat fisik, militer misalnya) apabila tidak mampu maka hendaknya ia merubahnya dengan mulutnya (dengan perkataan, kritik dan nasehat misalnya) apabila tidak mampu juga, lakukan dengan hati (pada diri sendiri yaitu dengan hati, agar tidak mengikuti kemungkaran tersebut juga) dan itu adalah tingkatan iman yang paling rendah.

Rendahnya iman ditandai dengan sedikitnya atau tidak ada sama sekali usaha yang dilakukan untuk merubah kemungkaran tadi. Sedangkan usaha tersebut sangat tergantung dengan sarana kekuasaan, yang jadi permasalahannya selanjutnya adalah cara mendapatkan serta mempengaruhi kekuasaan tersebut.

Pada zaman sekarang dengan keadaan yang tidak terlalu menguntungkan, tidak ada cara paling efektif selain berpolitik.

Sebuah kaidah ushul fiqh yang disepakati mayoritas ulama dan pemikir islam menyebutkan, segala yang menyebabkan suatu kewajiban (contohnya, Syari'at Islam) tidak sempurna kecuali dengannya (Politik), maka hukum sesuatu itu (Politik) wajib juga.

Politik Umat Dalam Sejarah

Ketika Khilafah masih tegak ummat Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara urusan agama dengan berbagai urusan kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁸. Tidak ada pemisahan antara kehidupan beragama dalam tataran kehidupan individual maupun sosial. Namun semenjak faham *negara-aqidah* dihapuskan lalu diganti dengan ideologi *nasionalisme* mulailah kaum muslimin mengalami pergeseran tolok ukur. Aqidah Islam yang sebelumnya dijadikan sebagai perekat utama masyarakat dilokalisir menjadi sebatas keyakinan individual muslim. Sedangkan masyarakat diarahkan untuk menjadikan etnisitas kebangsaan sebagai perekat kehidupan sosial. Seolah agama hanya berlaku dalam tataran pribadi, sedangkan dalam tataran sosial agama harus dikesampingkan. Kemudian muncullah ajaran primordial kebangsaan yang menggantikan agama sebagai identitas dan perekat sosial.

Sayyid Qutb dalam bukunya *Petunjuk Jalan* menyatakan bahwa dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam merupakan mata rantai terakhir dari rangkaian dakwah dan seruan ke jalan Islam yang telah berjalan lama di bawah pimpinan para Rasul dan utusan-utusan Allah yang mulia. Dakwah ini di sepanjang sejarah wujud manusia mempunyai sasaran dan tujuan yang satu. Yaitu, membimbing manusia untuk mengenal Tuhan mereka yang Maha Esa dan Yang Maha Benar, agar mereka menyembah dan mengabdikan hanya kepada Ilah Yang Maha Esa dan mengubur segala pemujaan terhadap sesama makhluk¹⁹. Seluruh umat manusia kecuali segelintir orang saja, tidak ingkar dengan dasar ketuhanan dan tidak menafikan wujudnya Tuhan; tetapi mereka salah pilih dalam hal mengenal hakikat Tuhan yang benar. Mereka menyekutukan Tuhan yang benar dengan tuhan-tuhan yang lain. Bisa dalam bentuk ibadat dan akidah, atau pun dalam bentuk ketaatan di bidang pemerintahan dan kekuasaan.

Dua bentuk itu adalah syirik yang bisa menyebabkan manusia keluar dari agama Allah. Padahal para Rasul sudah mengenalkan Allah swt. kepada mereka. Tapi, mereka mengingkariNya setelah berlalu beberapa masa dan generasi. Mereka pun kembali ke alam jahiliyah, kemudian kembali mensyirikkan Allah, baik dalam bentuk akidah dan ibadat, atau dalam bentuk ketaatan di bidang pemerintahan, atau pun di dalam dua bentuk itu sekaligus.

Inilah dia tabiat dakwah ke jalan Allah di sepanjang sejarah umat manusia. Ia mempunyai tujuan dan sasaran yang satu yaitu “Islam (menyerah)” di dalam pengertian penyerahan diri sepenuhnya, penyerahan diri dan kepatuhan para hamba kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam, menarik umat manusia keluar dari mengabdikan diri kepada sesama hamba Allah, kepada suasana menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah SWT, membawa mereka keluar dari sikap patuh dan tunduk kepada sesama hamba Allah di dalam urusan peraturan hidup dan pemerintahan, nilai-nilai dan kebudayaan, untuk bersikap patuh dan tunduk kepada kekuasaan pemerintahan dan peraturan Allah saja di dalam semua urusan hidup.”

Untuk inilah Islam datang melalui Nabi Muhammad *shollallahu 'alaih wa sallam* sebagaimana ia datang melalui para Rasul sebelum beliau. Ia datang untuk membawa umat manusia patuh kepada kekuasaan dan pemerintahan Allah seperti seluruh alam ini berjalan mengikuti landasan peraturan Allah.”

Sebuah masyarakat Islam berbeda sama sekali dari masyarakat Jahiliyyah. Masyarakat Islam berdiri di atas fondasi aqidah Tiada Tuhan Selain Allah, keyakinan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat memuja, memuji, memohon pertolongan, menyerahkan kepatuhan dan loyalitas total. Penghambaan kepada Allah bukan tercermin dalam urusan ibadah ritual-formal belaka. Tetapi ia juga tercermin dalam aspek nilai-nilai moral serta hukum-hukum pribadi maupun sosial yang berlaku dalam kehidupan manusia sehari-hari.

Sedangkan suatu masyarakat Jahiliyyah berdiri di atas pondasi bahwa sesama manusia pantas untuk dipuji, dipuja, dimintai pertolongannya, diserahkan kepatuhan dan loyalitas kepadanya. Oleh karenanya di dalam masyarakat seperti ini akan selalu hadir para thaghut, yaitu fihak yang sedikit saja memperoleh kekuasaan lalu berlaku melampaui batas sehingga menuntut ketaatan dari para rakyatnya, pengikutnya, muridnya, bawahannya. Dalam sejarah kemanusiaan

Allah abadikan di dalam AlQur'an gambaran sosok thaghut paling ideal yaitu Fir'aun. Fir'aun telah sedemikian rupa berlaku sombong sehingga memproklamirkan dirinya di hadapan rakyat Mesir yang ia pimpin dengan kalimat: "Akulah tuhan kalian yang Maha Mulia.

فَكَذَّبَ وَعَصَى ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾

*"Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya. (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".*²⁰

Itulah sebabnya mengapa segenap para Nabi dan Rasul utusan Allah menyampaikan suatu seruan universal yang berlaku sepanjang zaman. Yaitu seruan kepada umatnya masing-masing agar menyembah Allah semata dan menjauhkan diri dari para thaghut.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ط

*"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.""*²¹

Politik Islam adalah politik syar'i. Ia merupakan politik yang berlandaskan konsepsi mendasar aqidah Islamiyyah, yaitu *La Ilaha Illa Allah*, keyakinan bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya tempat memuja, memuji, memohon pertolongan, menyerahkan kepatuhan dan loyalitas total. Politik Islam pasti akan menghantarkan masyarakat untuk membentuk diri menjadi masyarakat Islam. Sedangkan politik jahiliyyah merupakan politik yang tidak syar'i. Politik jahiliyyah akan menghasilkan tumbuhnya sebuah masyarakat jahiliyyah lengkap dengan suburnya eksistensi para thaghut di dalamnya. Politik seperti ini akan menyebabkan manusia sadar tidak sadar menghamba kepada sesama manusia.

Mengomentari kondisi realita umat Islam dewasa ini semenjak tidak lagi hidup di bawah naungan sistem Khilafah Islamiyyah yang telah runtuh 85 tahun yang lalu, maka hilanglah Islam dari kehidupan manusia secara hampir sempurna. Hilanglah sistem politiknya, dan hilanglah konsepnya dari umat, untuk digantikan

dengan konsep nasionalisme. Konsepnya hilang dari negara, untuk digantikan dengan konsep lain. Juga hilang dari ruang pengadilan, untuk digantikan yang lain. Syariatnya hilang digantikan dengan perundangan lain. Konsepnya hilang dari ruang-ruang permusyawaratan, untuk digantikan konsep demokrasi Timur atau Barat. Konsepnya hilang dari kekuasaan eksekutif untuk digantikan dengan konsep jahiliah secara total. Konsepnya hilang dari partai-partai yang Rabbani untuk digantikan oleh sistem kepartaian jahiliah.

Perjuangan Nabi *shollallahu 'alaih wa sallam* dan para sahabat ketika mereka masih tertindas di kota Mekkah sebelum hijrah ke Madinah. Perjuangan tanpa sedikitpun berfikir untuk berkompromi dengan sistem jahiliyyah dan para thaghutnya ketika mereka masih lemah sekalipun. Sebab mereka hanya punya satu cita-cita, yaitu mengembalikan hati manusia ke dalam pangkuan aqidah kalimat tauhid dimana manusia diajak untuk hanya menghamba kepada Allah dan tunduk kepada syariat-Nya. Nabi *shollallahu 'alaih wa sallam* dan para sahabat tidak pernah sejenakpun bertoleransi dengan aqidah kemusyrikan dan tunduk kepada sistem jahiliyyah yang berlaku, betapapun resikonya mereka terpaksa mengalami berbagai ujian, tekanan, penyiksaan, penindasan bahkan pembunuhan.

Politik Islam tidak sama dengan Politik Jahiliyyah. Berbeda satu sama lain dalam hal landasan keyakinannya, semangatnya, fikrah-ideologinya, sistem pembentukannya, budayanya, tingkah-laku para pelakunya. Yang jelas, keduanya sangat berbeda secara fundamental dalam hal siapa yang dijadikan pusat kesetiaan, penghambaan dan ketergantungan. Politik Islam sejak hari pertama telah memproklamirkan dirinya sebagai sebuah mega-proyek untuk pembebasan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah semata. Sedangkan Politik Jahiliyyah menjadikan sesama manusia sebagai tempat menyerahkan loyalitas, ketaatan dan ketergantungan sehingga suburlah di dalamnya para thaghut yaitu kesesatan dari jalan Allah SWT.

Penutup

Islam adalah aturan tatanan hidup manusia. Di dalamnya terdapat berbagai aturan mengenai seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik. Politik dalam hal ini dimaknai sebagai cara-cara mengatur dan memimpin sesuatu untuk membawanya pada kemaslahatan. Oleh karena itu, politik yang diatur dalam

Islam adalah bebas dalam model-model atau bentuknya namun terikat pada nilai-nilai, tujuan, tata cara, proses dan hasilnya yaitu seperti yang diatur secara ketat dalam Islam

Pengaturan Islam dalam bidang politik telah termaktub dalam al-Qur'an. Isu agama dan politik muncul ketika politik tidak lagi secara linier mengacu pada prinsip-prinsip dan aturan al-Qur'an. Kemudian, ketika di dalam kancah perpolitikan ditemukan adanya kepentingan-kepentingan pragmatis masing-masing penggiat politik yang berbeda satu kelompok dengan kelompok lainnya. Pada saat demikian akan timbul masalah, persinggungan dan ketidakharmonisan. Bahkan hingga pada kondisi kekisruhan politik, islam tetap memberikan solusinya namun, namun berbagai kepentingan pragmatis duniawi menjauhkan solusi yang diberikan Islam tersebut. Pada saat demikianlah terasa adanya masalah antara agama dan politik, antara Islam dengan politik.

Islam membimbing dan mengatur urusan politik, hal ini menyadarkan kita bahwa umat Islam memiliki kekuatan dan peluang besar untuk memegang kendali perpolitikan di negara mereka masing-masing dan kiprah mereka telah terukir sepanjang sejarah Islam. Hal yang terpenting dari pelajaran sejarah tersebut adalah diutamakannya konsistensi (istiqamah) dalam menjalankan politik Islam. Karena hanya dengan politik islam yang dilandasi ketuhanan dan menjanjikan kedamaian dan pemerataan, kesejahteraan hidup dapat tercapai.

Catatan

¹ QS. Al-Muthaffifin ayat 1-4

² Abdur Rahman Taj dalam karyanya *Al-Siyasat al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*, (Mesir, Dar al-Ta'lif, 1953), h. 10-11

³ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VI, (Beirut; Dar Shadir, 1968) h. 108

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah al-Syar'iyah*, (al-Qahirah; Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5

⁵ [Rasulullah SAW](#) sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya : "Adalah [Bani Israil](#), mereka diurusi urusannya oleh para [nabi](#) (*tasusuhumul anbiya*). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para [khalifah](#)" (HR. [Bukhari](#) dan [Muslim](#)).

⁶ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi hingga Masa Kini* Terj. oleh: Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati, (Jakarta; Serambi, 2007), h. 26

⁷ Muhammad A. al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta; Rajawali, 1986), h. 254-255

⁸ T.W. Arnold, *Khalifa*, dalam M. TH. Houstma, et. Al. (ed.), *First Encyclopedia of Islam*, Vol. IV, Leiden; EJ. Brill, 1987), h. 84

⁹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam*, h. 32

¹⁰ QS. Ali Imran ayat 159

¹¹ QS. Asy-Syura ayat 38

¹² QS. Al-Ma'idah ayat 8

¹³ QS. An-Nisa' ayat 58

¹⁴ QS. An-Nisa' ayat 65

¹⁵ QS. An-Nahl ayat 125

¹⁶ QS. Al-Hujurat ayat 13

¹⁷ QS. Ali Imran ayat 104

¹⁸ [Saiful Mujani](#), *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 5

¹⁹ Ali Abdul Raziq berpendapat dalam hal ini bahwa adanya kesulitan-kesulitan yang agak luar biasa yang dihadapkan kepada mereka yang hendak mengenyampingkan pendapat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT, pemegang kekuasaan politik (*political sovereign*) dan sekaligus pendiri pemerintahan politik (*political government*), Ali Abdul Raziq, *Kekhilafahan dan Dasar-dasar Kekuasaan*, dalam John Donohue dan John L. Esposito, ed. *Islam dan pembaharuan*, (Jakarta; Rajawali Press, 1993), h. 40

²⁰ QS. An-Naziat ayat 21-24

²¹ QS. An-Nahl ayat 36

Bibliografi

Abdul Wahab Khallaf, *Siyasah al-Syar'iyah*, (al-Qahirah; Dar al-Anshar, 1977)

Abdur Rahman Taj dalam karyanya *Al-Siyasat al-Syar'iyah wa al-fiqh al-Islami*, (Mesir, Dar al-Ta'lif, 1953)

Ali Abdul Raziq, *Kekhilafahan dan Dasar-dasar Kekuasaan*, dalam John Donohue dan John L. Esposito, ed. *Islam dan pembaharuan*, (Jakarta; Rajawali Press, 1993)

Al-Qur'an al-Karim

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam; Dari Masa Nabi hingga Masa Kini* Terj. oleh: Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati, (Jakarta; Serambi, 2007)

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid VI, (Beirut; Dar Shadir, 1968)

Muhammad A. al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta; Rajawali, 1986)

Saiful Mujani, *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2007).

T.W. Arnold, *Khalifa*, dalam M. TH. Houstma, et. Al. (ed.), *First Encyclopedia of Islam*, Vol. IV, Leiden; EJ. Brill, 1987).